

Judul : Percepatan integrasi data, administrasi penduduk perlu segera dibenahi
Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 17

Percepat Integrasi Data

Administrasi Penduduk Perlu Segera Dibenahi

ANGGOTA Komisi II DPR Deddy Sitorus mendorong percepatan integrasi data nasional melalui sistem satu data terpusat. Pengelolaan data selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi jelas antarlembaga negara. Bahkan, sistem administrasi penduduk ini tertinggal dari negeri jiran.

Dedly mengatakan, data yang belum terintegrasi menghambat efektivitas layanan publik serta menambah beban anggaran belanja negara yang cukup besar setiap tahun. Pemerintah harus segera menunjuk satu institusi utama sebagai pengelola pusat data nasional.

Menurutnya, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) paling relevan mengemban amanah ini, karena punya basis data luas. Untuk itu, harus ada instruksi tegas agar kementerian lain segera melakukan koordinasi pendataan secara terpadu.

Integrasi data wajib dilakukan agar seluruh kebutuhan lintas sektor bisa terhubung serta optimal. Langkah ini menjamin efisiensi birokrasi dalam mengelola informasi warga negara yang selama ini terfragmentasi. "Makanya, penguatan koordinasi jadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola informasi yang jauh lebih transparan," katanya, Selasa (21/4/2026).

Karena kurangnya koordinasi, praktik duplikasi pengumpulan data berbagai lembaga negara terus terjadi yang memicu pemborosan anggaran. Instansi seperti KPU, BPJS, hingga kementerian teknis membangun sistem sendiri padahal data dasar sudah tersedia. Fenomena pengulangan pengumpulan informasi warga ini harusnya bisa dihindari jika integrasi berjalan baik.

Redundansi atau duplikasi sistem, lanjutnya, menciptakan inefisiensi dan memperbesar potensi ketidaksinkronan data kependudukan secara nasional. Kualitas ego sektoral antarinstansi yang lebih mementingkan kewenangan daripada tanggung jawab pelayanan jadi sorotan masyarakat. Persoalan ini harus segera dibenahi agar tidak ada lagi tumpang tindih regulasi maupun teknis pelaksanaan.

Redundansi berulang juga membuka celah praktik tidak sehat dalam pengelolaan anggaran negara. Semua pihak berebut urusan yang akhirnya merugikan keuangan publik hingga triliunan rupiah setiap tahun. "Pemataan ulang sistem satu data akan menutup potensi penyelewengan dana yang dikelola kementerian terkait," tegasnya.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizam Karsayuda menambahkan, sistem administrasi

kependudukan Indonesia masih tertinggal. Dia membandingkan dengan Malaysia yang sukses mengintegrasikan data identitas warga untuk berbagai kebutuhan administratif sejak lama. Ini jadi dasar urgensi perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan informasi kependudukan di Indonesia.

Dia memiliki pengalaman bermukim di Malaysia pada periode 2007 hingga 2009 silam. Masyarakat setempat sudah terbiasa menggunakan nomor kartu identitas tunggal untuk keperluan administratif serta transaksi ekonomi secara efisien. Sistem itu memudahkan warga dalam mengakses berbagai layanan tanpa perlu membawa banyak berkas fisik.

Integrasi nomor identitas memungkinkan verifikasi cepat melalui sidik jari untuk memantau rekam jejak finansial warga. Kepatuhan pajak juga terpantau dengan sangat akurat melalui sistem yang canggih itu. "Kecanggihan teknologi Malaysia pada dua dekade lalu bahkan sudah melampaui kondisi riil di Indonesia saat ini," ucapnya.

Kelemahan sistem data, kata Rifqi, berdampak pada berbagai bidang. Di antaranya, masalah akurasi Daftar Pemilih Tetap dalam pelaksanaan pemilu, khususnya saat perubahan status

warga, seperti kematian atau pensiunan TNI serta Polri, tidak terintegrasi otomatis. Itu berpotensi menghilangkan hak konstitusional orang untuk memilih pemimpin dalam setiap gelaran pemilu.

Dia juga mencontohkan sulitnya sinkronisasi data digital bagi warga yang telah mendapatkan surat kematian resmi. Kondisi data yang tidak terbarukan secara otomatis menghambat akurasi basis data kependudukan secara nasional. Akibatnya, data orang yang sudah meninggal dunia seringkali masih tercatat aktif dalam sistem pusat.

Makanya, penguatan pengawasan administrasi kependudukan harus jadi fondasi utama perbaikan layanan publik di Indonesia. Revisi RUU Adminduk merupakan isu krusial yang harus segera dibahas bersama DPR dan Pemerintah. "Regulasi baru akan memberikan payung hukum kuat bagi transformasi sistem digital yang lebih modern," terangnya.

Komisi II, lanjut Rifqi, berkomitmen menjadikan data Dukcapil sebagai basis utama seluruh jenis pelayanan publik. Berbagai aturan mendorong penggunaan NIK sebagai identitas tunggal berbasis digital, meski implementasinya masih menghadapi kendala. Transformasi ini memerlukan dukungan

penuh dari seluruh kementerian terkait agar pemanfaatan NIK bisa berjalan maksimal.

Revisi UU jadi langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Langkah ini bertujuan membawa Indonesia sejajar dengan kemajuan negara berkembang lainnya di Asia. Digitalisasi identitas akan memutakhirkan pengawasan sekaligus mempercepat proses birokrasi yang selama ini dikenal sangat lambat.

Rifqi menggambarkan visi masa depan administrasi kependudukan Indonesia yang sepenuhnya terintegrasi secara digital. Ke depan, masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen fisik seperti SIM, NPWP, hingga sertifikat tanah. "Cukup menggunakan identitas tunggal, warga bisa mengakses semua hak layanan publik tanpa ada hambatan teknis," ucapnya.

Senada, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, admin-

duk merupakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga. Namun, dasar hukum UU Nomor 24 Tahun 2013 perlu disesuaikan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah terus mengkaji relevansi landasan hukum yang ada agar sesuai dengan kebutuhan digitalisasi masa kini. ■ PYB